



**Kementerian PPN/
Bappenas**

EVALUASI PELAKSANAAN UU 25/2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

**Disampaikan pada :
FGD PERFEKTIF K/L TERHADAP UU 25/2004**

**Edi Effendi Tedjakusuma
Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan
Bappenas**



Kerangka Paparan

1. Latar Belakang Perlunya UU 25/2004
2. UU 25/2004: SPPN
3. Evaluasi Kinerja Pembangunan
4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut



1

**LATAR BELAKANG PERLUNYA
UU 25/2004**

Latar Belakang

- Dinamika pembangunan nasional:
Ketiadaan GBHN, Desentralisasi dan Otda,
kemiskinan, kesenjangan pembangunan
- Globalisasi: perdagangan bebas,
Demokratisasi, HAM, isu PI dan LH,
Ketahanan Pangan dan Energi, dll
- Keterbatasan sumber daya
- Daya saing nasional



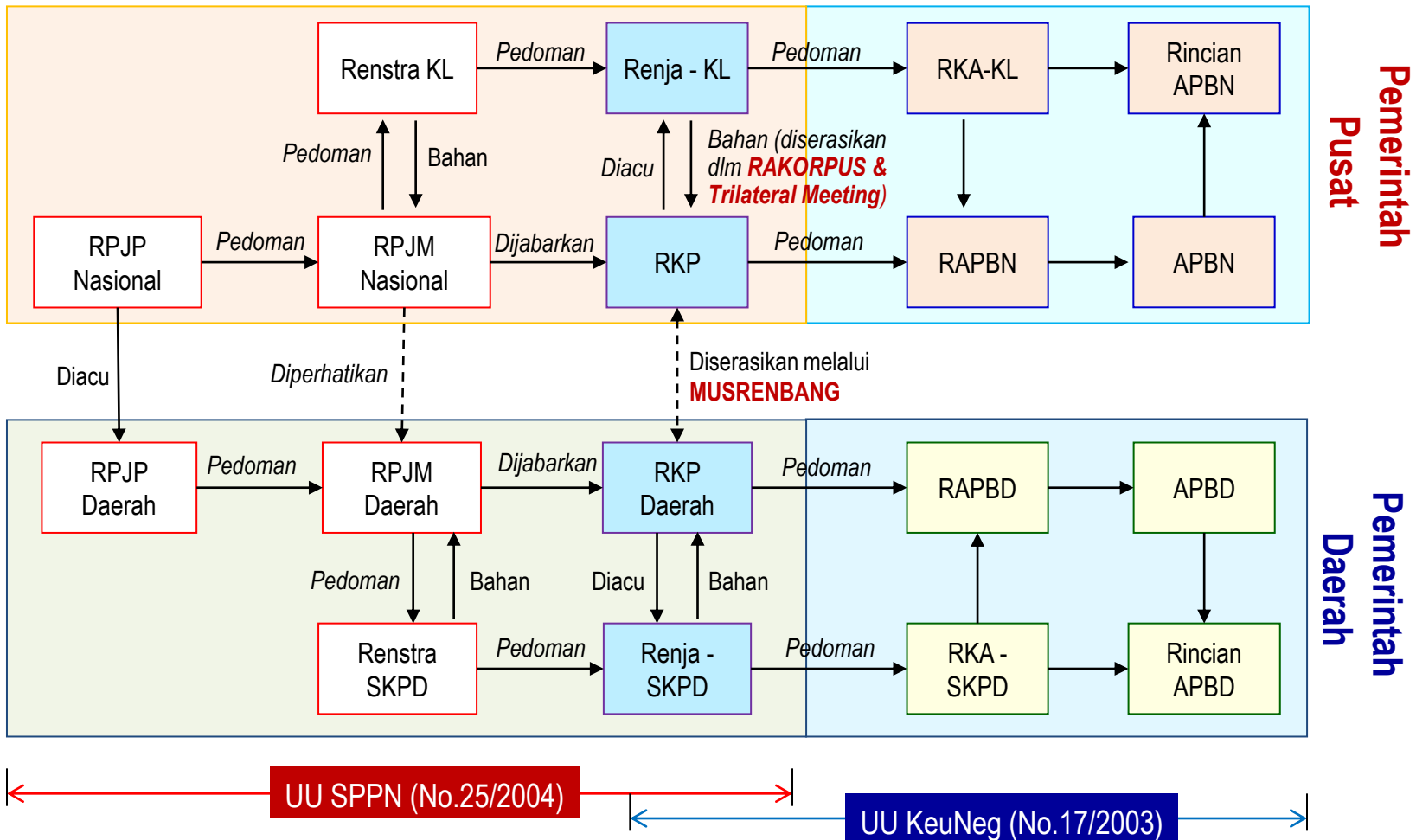
2

**UU 25/2004
SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL**

PERENCANAAN

EVALUASI

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU 25/2004)



*) RPJPD Mengikuti Permendagri 54/2010

Pengertian SPPN

Substansi	Hasil Evaluasi
<p>Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah</p>	<p>Rencana Pembangunan Setiap Tingkatan Pemerintahan Telah disusun sesuai waktu dan stakeholder</p>

Proses Perencanaan

Substansi	Hasil Evaluasi
<p><u>Proses Politik</u> : Pemilihan langsung dipandang sebagai proses perencanaan karena menghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk Visi, Misi, dan Program yang ditawarkan Presiden / Kepala Daerah terpilih selama kampanye.</p>	<p>Telah Terlaksana</p>
<p><u>Proses Teknokratik</u> : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan</p>	<p>Telah Terlaksana</p>
<p><u>Proses Partisipatif</u> : Perencanaan yang melibatkan para pemangku kepentingan pembangunan (<i>stake holders</i>) → Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang</p>	<p>Telah Terlaksana</p>
<p><u>Proses Bottom-Up dan Top-Down</u> : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan</p>	<p>Telah Terlaksana</p>

Tahapan Rencana

(1. Penyusunan Rencana)

Substansi	Hasil Evaluasi
Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah	Telah Tersedia
Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD	Telah Tersedia
Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Telah Dilaksanakan Seluruhnya
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan	Telah Tersedia

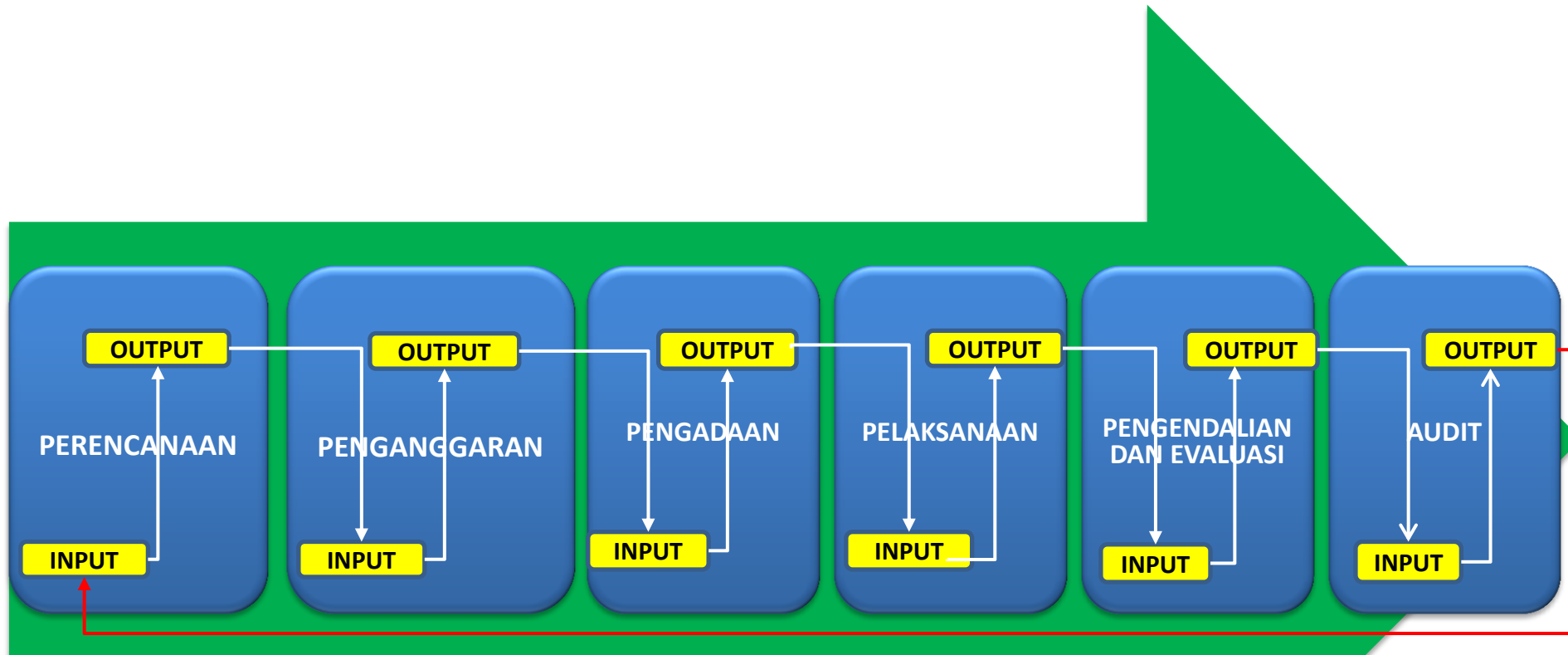
Tahapan Rencana

(2. Penetapan Rencana)

Substansi	Hasil Evaluasi
RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda	Sesuai dengan Aturan
RPJM dengan Keputusan Presiden / Kepala Daerah (3 Bulan Setelah Pelantikan Kepala Daerah	RPJMD dengan Perda *)
RKP / RKPD dengan Kep. Presiden / Kepala Daerah	Sesuai dengan Aturan

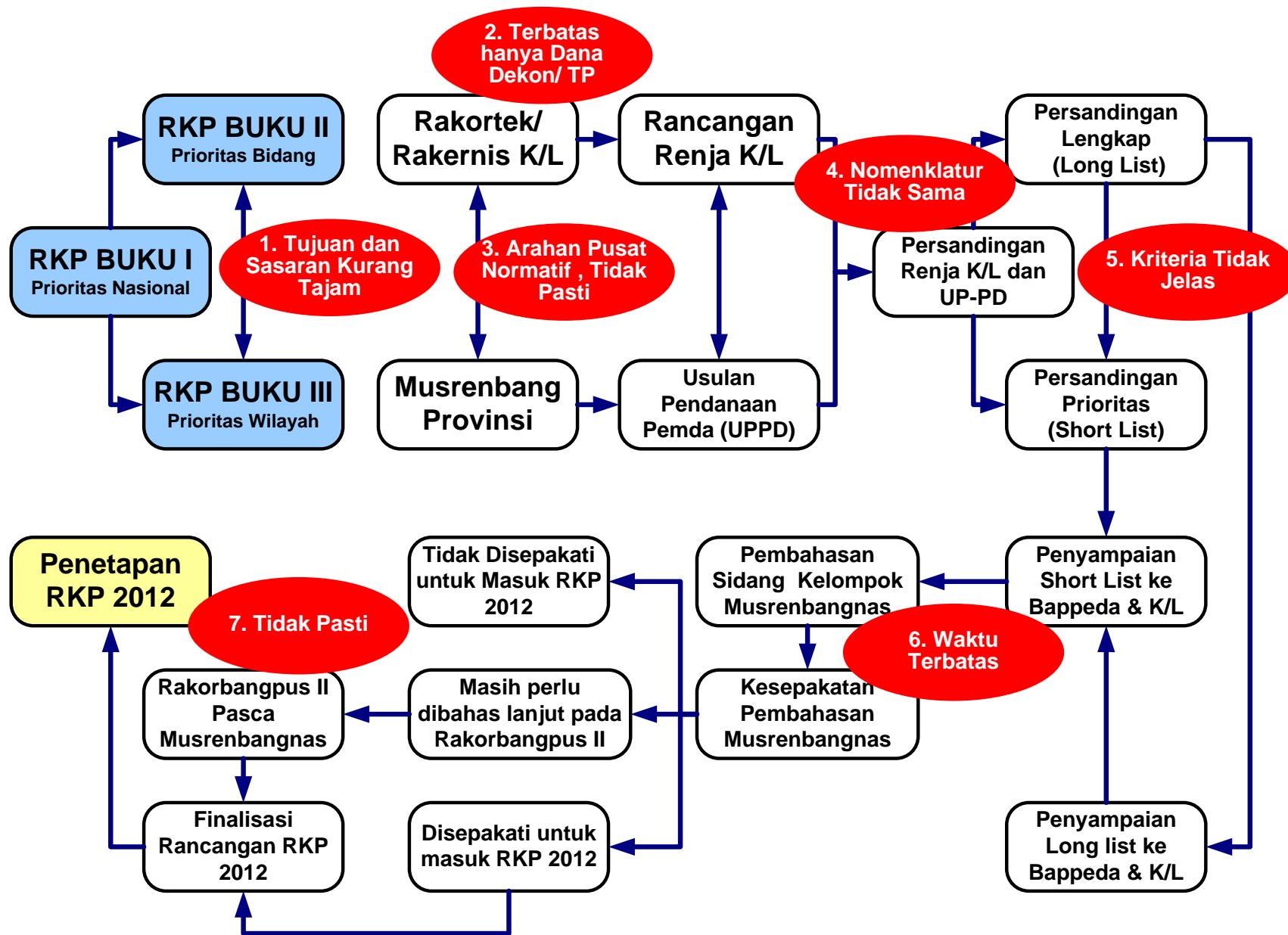
*) UU 32/2004 Mensyaratkan RPJMD menggunakan Perda dengan waktu 6 bulan setelah pelantikan

PERLUNYA SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGADAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI, SERTA AUDIT TERINTEGRASI



1. Paradigma Pembangunan
2. Pengembangan Sistem Pembagian Kewenangan/Otoritas
3. Pengaturan Struktur Organisasi K/L dan Lembaga Tinggi Negara
4. Pengembangan Manajemen SDA dan Asset Bangsa
5. Pengaturan Sumber Daya Manusia (Aparatur)
6. Pengaturan Sistem Informasi Pemerintahan (*E-Governance*)

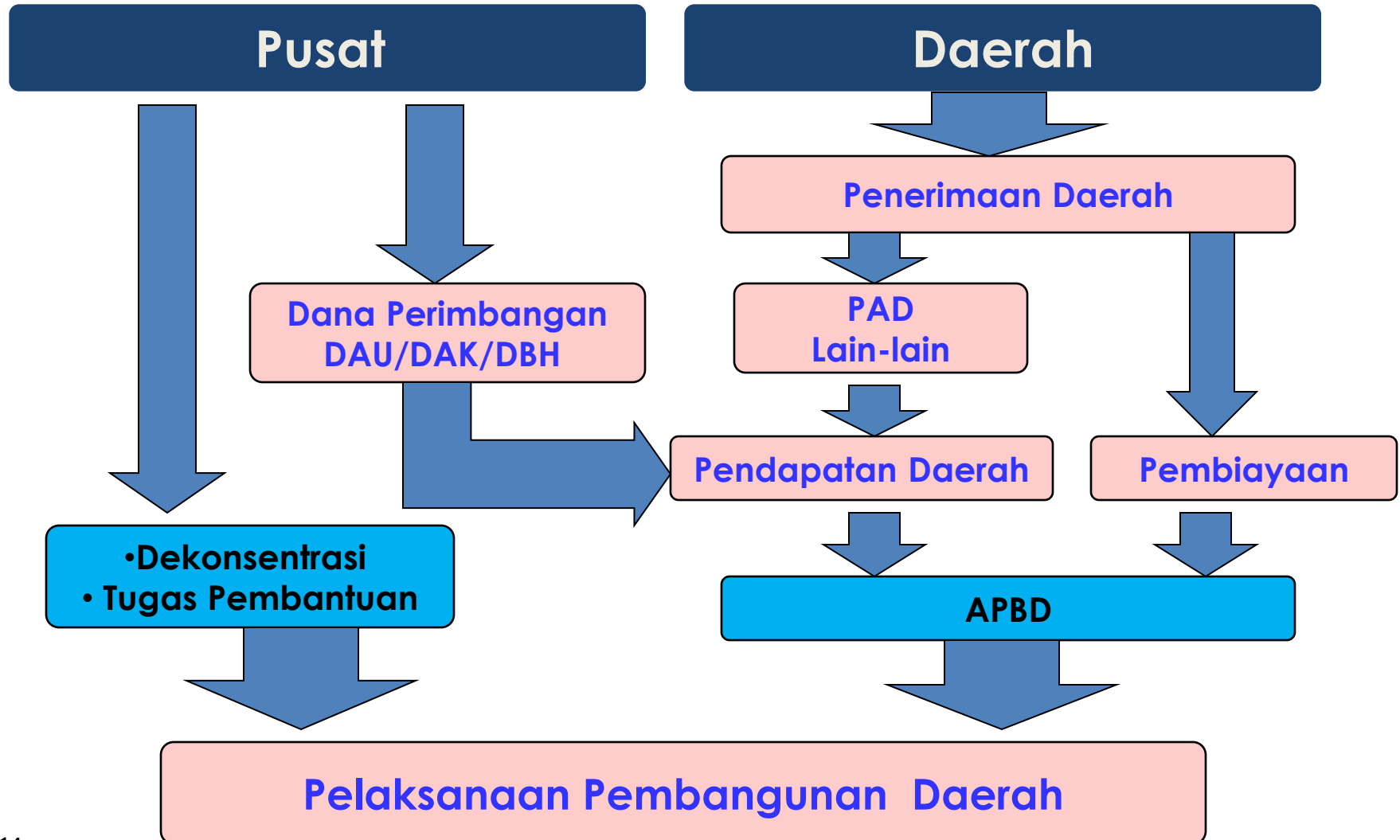
TITIK KRITIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



7 TITIK KRITIS PERENCANAAN TAHUNAN

- 1. Penajaman Tujuan dan Sasaran** yang akan dicapai;
- 2. Lingkup pembahasan yang terbatas pada Dana Dekonsentrasi (Dekon) dan Tugas Pembantuan (TP)**, belum menyentuh dana transfer ke daerah, rencana investasi swasta dan rencana penyaluran kredit perbankan;
- 3. Kejelasan arahan dari Pemerintah Pusat** (Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga) kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota karena bersifat normatif dan tidak pasti;
- 4. Standarisasi nomenklatur Program dan Kegiatan K/L** dengan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
- 5. Kejelasan kriteria penetapan prioritas** Program dan Kegiatan K/L yang akan dilaksanakan di setiap provinsi;
- 6. Keterbatasan waktu pembahasan** sinergi Program dan Kegiatan K/L dengan Program dan Kegiatan SKPD sehingga tidak menghasilkan keputusan yang bersifat final;
- 7. Kepastian hasil Musrenbangnas** sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja K/L dan RKA K/L

Pendanaan Pembangunan Daerah (UU 17/2004)





3

**EVALUASI KINERJA PERENCANAAN
DAN KINERJA PEMBANGUNAN**

PERENCANAAN

BAGIAN DARI SIKLUS PEMBANGUNAN

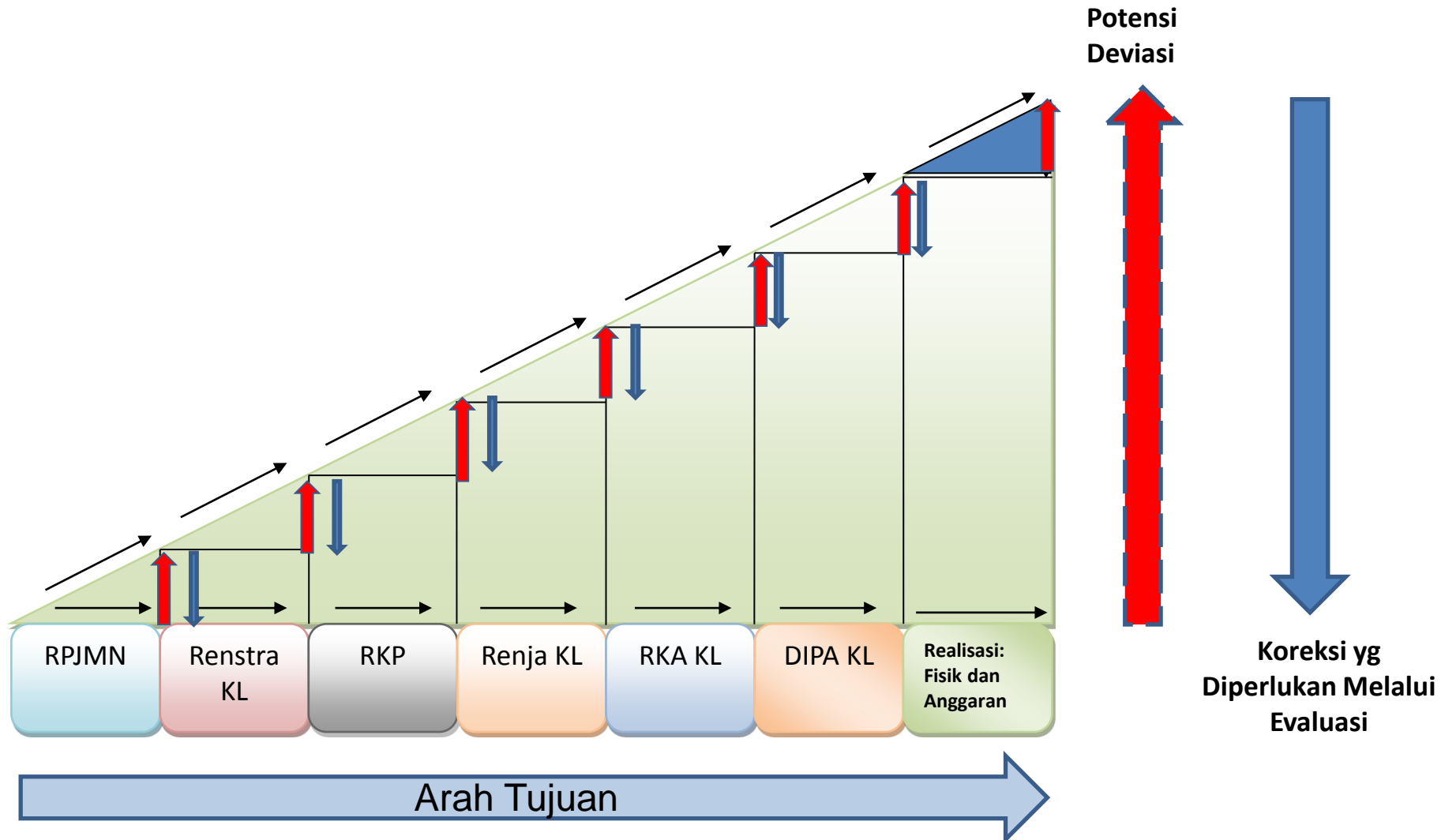


ALUR LOGIKA PERUMUSAN PERENCANAAN



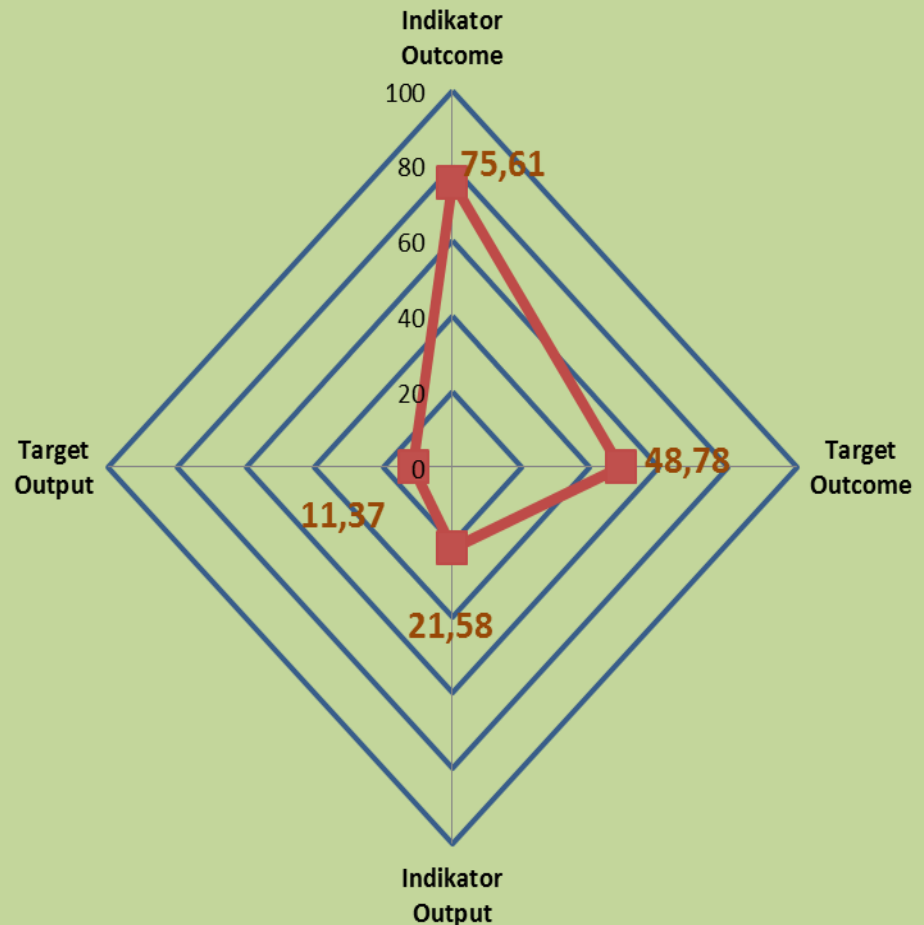


PERAN EVALUASI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN



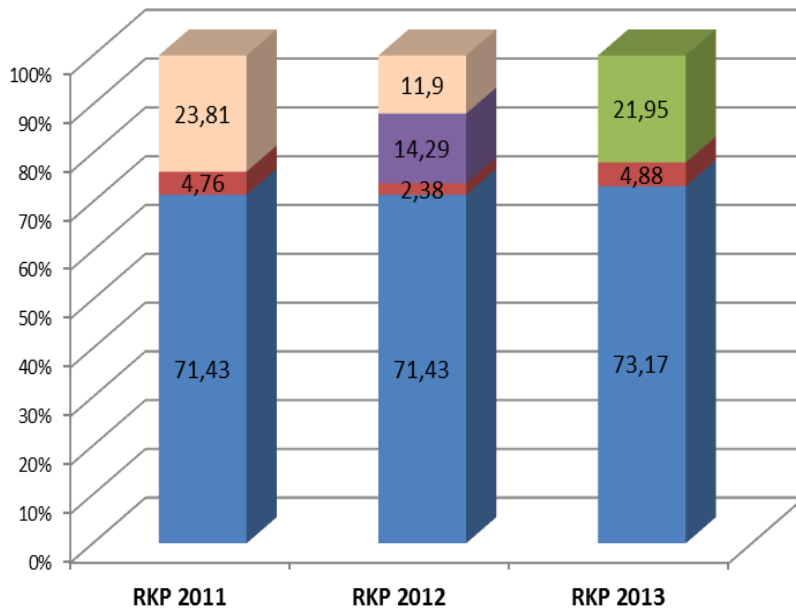
Konsistensi Indikator dan Target RKP 2013 terhadap RPJMN 2010-2014

- Jumlah **indikator outcome** RKP 2013 yg sama dgn indikator outcome RPJM 2010-2014 sebesar 75,61%, sementara target outcome RKP 2013 yg sama dgn target outcome RPJM hanya sebesar 48,78 %
- Di tingkat output, jumlah **indikator output** RKP 2013 yg sama dgn indikator output RPJM hanya sebesar 21,58 %, sementara target output RKP 2013 yg sama dgn RPJM sebesar 11,37 %.

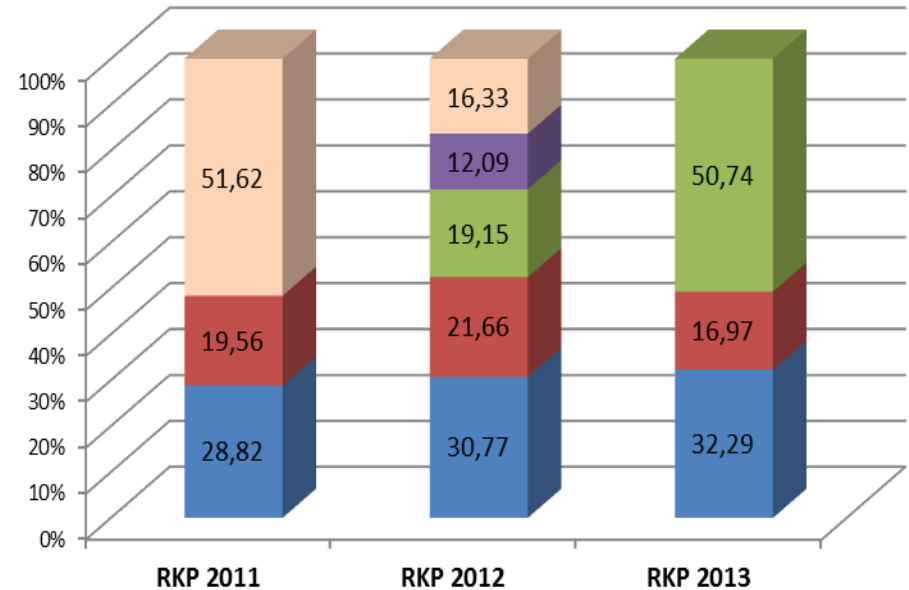


Konsistensi Indikator Outcome dan Output RKP 2011-2013

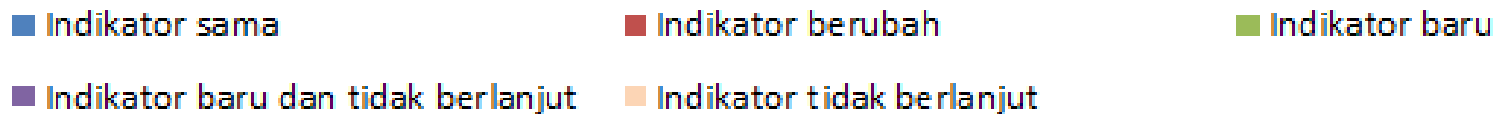
Outcome



Output




- Kesenambungan sasaran pembangunan pada level outcome cukup tinggi, sekitar 70%.
- Namun, kesenambungan sasaran pembangunan pada level output relatif rendah, sekitar 30%.




HASIL PEMETAAN KETERKAITAN

KEGIATAN PRIORITAS RKP - RKAKL 2012 DAN RKP - RKAKL 2013

NO.	PRIORITAS DALAM RKP 2013	JUMLAH PROGRAM		JUMLAH KEGIATAN		JUMLAH INDIKATOR		TERPETAKAN								TIDAK TERPETAKAN			
		2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012				2013				2012		2013	
								L	TL	JML.	%	L	TL	JML.	%	TTP	%	TTP	%
1	Reformasi Birokrasi & Tatakelola	17	15	52	43	144	120	55	32	87	60,4	99	15	114	95,0	57	39,6	6	5,0
2	Pendidikan	7	7	22	18	71	63	26	37	63	88,7	47	13	60	95,2	8	11,3	3	4,8
3	Kesehatan	9	10	25	28	66	73	18	17	35	53,0	42	16	58	79,5	31	47,0	15	20,5
4	Penanggulangan Kemiskinan	28	29	64	57	153	137	91	27	118	77,1	92	13	105	76,6	35	22,9	32	23,4
5	Ketahanan Pangan	29	28	80	72	322	251	227	22	249	77,3	178	34	212	84,5	73	22,7	39	15,5
6	Infrastruktur	16	15	40	36	169	108	51	51	102	60,4	80	15	95	88,0	67	39,6	13	12,0
7	Iklim Investasi & Iklim Usaha	15	17	35	33	117	93	72	16	88	75,2	63	11	74	79,6	29	24,8	19	20,4
8	Energi	12	13	27	26	80	59	41	16	57	71,3	26	14	40	67,8	23	28,8	19	32,2
9	Lingk. Hidup & Pengelolaan Bencana	12	13	43	51	134	146	84	22	106	79,1	86	41	127	87,0	28	20,9	19	13,0
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca Konflik	25	33	64	62	219	187	121	12	133	60,7	118	23	141	75,4	86	39,3	46	24,6
11	Kebudayaan, Kreatifitas & Inovasi Teknologi	7	8	19	14	41	28	24	2	26	63,4	18	3	21	75,0	15	36,6	7	25,0
12	Perekonomian	23	33	34	60	84	145	45	13	58	69,0	63	29	92	63,4	26	31,0	53	36,6
13	Kesejahteraan Rakyat	12	28	17	73	53	170	19	13	32	60,4	88	44	132	77,6	21	39,6	38	22,4
14	Politik, Hukum & Keamanan	10	10	36	35	62	71	49	7	56	90,3	46	11	57	80,3	6	9,7	14	19,7
	TOTAL PEMETAAN	222	259	558	608	1.715	1.651	923	287	1.210	70,5	1.046	282	1.328	80,3	505	29,5	323	19,7

 = Tahun 2012

 = Tahun 2013

L=Langsung TL= Tidak Langsung

TTP= Tidak terpetakan

KONSISTENSI PENCAPAIAN VISI – MISI NASIONAL DALAM RPJMN 2010 -2014

Tujuan

1. Sebagai alat kontrol:
Mengukur tingkat pencapaian pembangunan nasional RPJMN 2010-2014 terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
2. Sebagai alat perbaikan:
Mencari upaya-upaya perbaikan yang terfokus, efektif, dan efisien untuk mencapai sasaran pembangunan nasional tahun 2014.

Kerangka Pikir



Pelaksanaan : Pertengahan s.d. Akhir Tahun 2012



REKAPITULASI *REVIEW* RPJMN 2010-2014

Beberapa indikator utama pembangunan sudah *on track* dan bahkan telah tercapai. Namun, beberapa sasaran masih memerlukan perhatian khusus di 2014.

NO	PRIORITAS NASIONAL	1	2	3
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	4	2	4
2	Pendidikan	6	0	0
3	Kesehatan	3	3	4
4	Penanggulangan Kemiskinan	4	1	0
5	Ketahanan Pangan	3	5	1
6	Infrastruktur	8	2	1
7	Iklm Investasi dan Iklm Usaha	3	3	1
8	Energi	3	1	2
9	Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana	11	0	0
10	Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	1	3	0
11	Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi	5	0	0
12	Politik, Hukum, dan Keamanan	8	5	0
13	Perekonomian	1	2	0
14	Kesejahteraan Rakyat	6	0	0
JUMLAH		66	27	13
PERSENTASE		62%	26%	12%



= Sudah tercapai atau *On Track/on Trend*

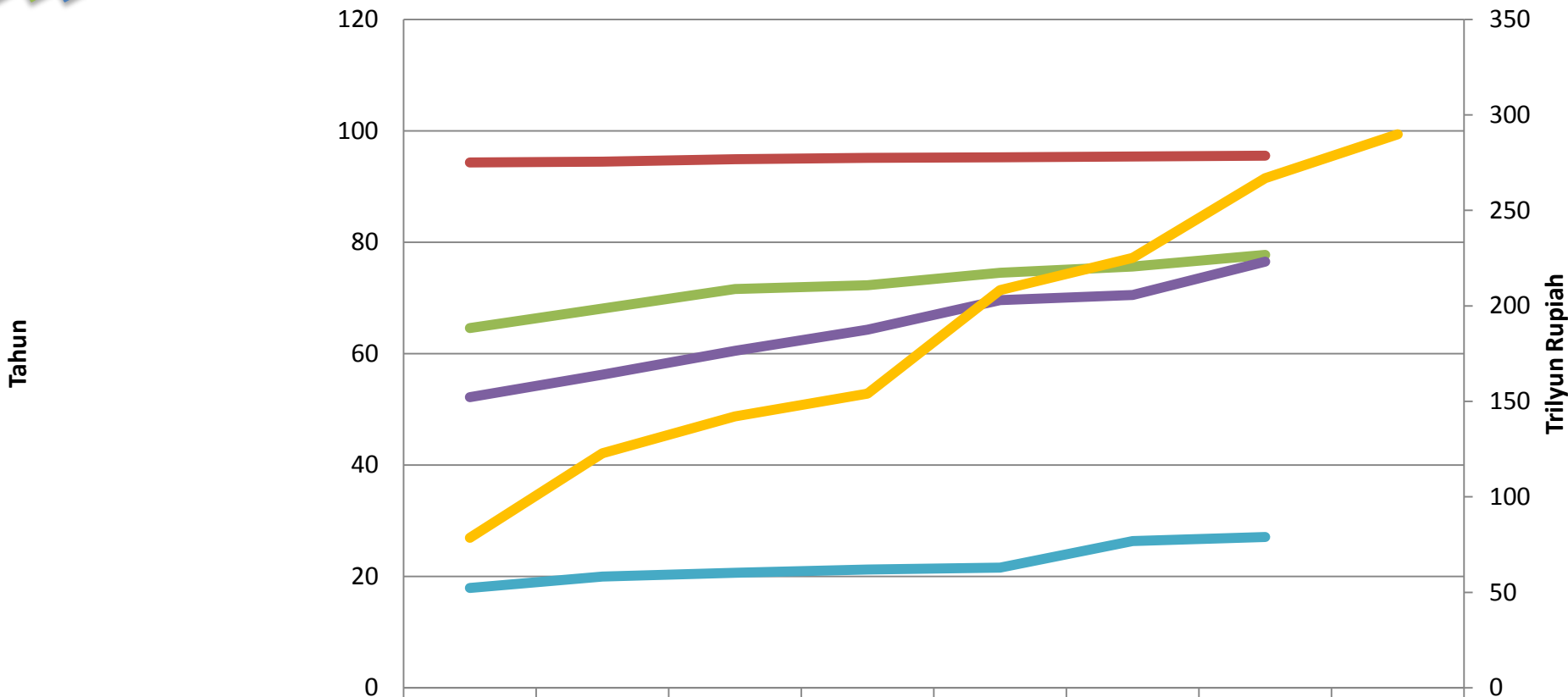


= Perlu Kerja Keras



= Sangat Sulit tercapai

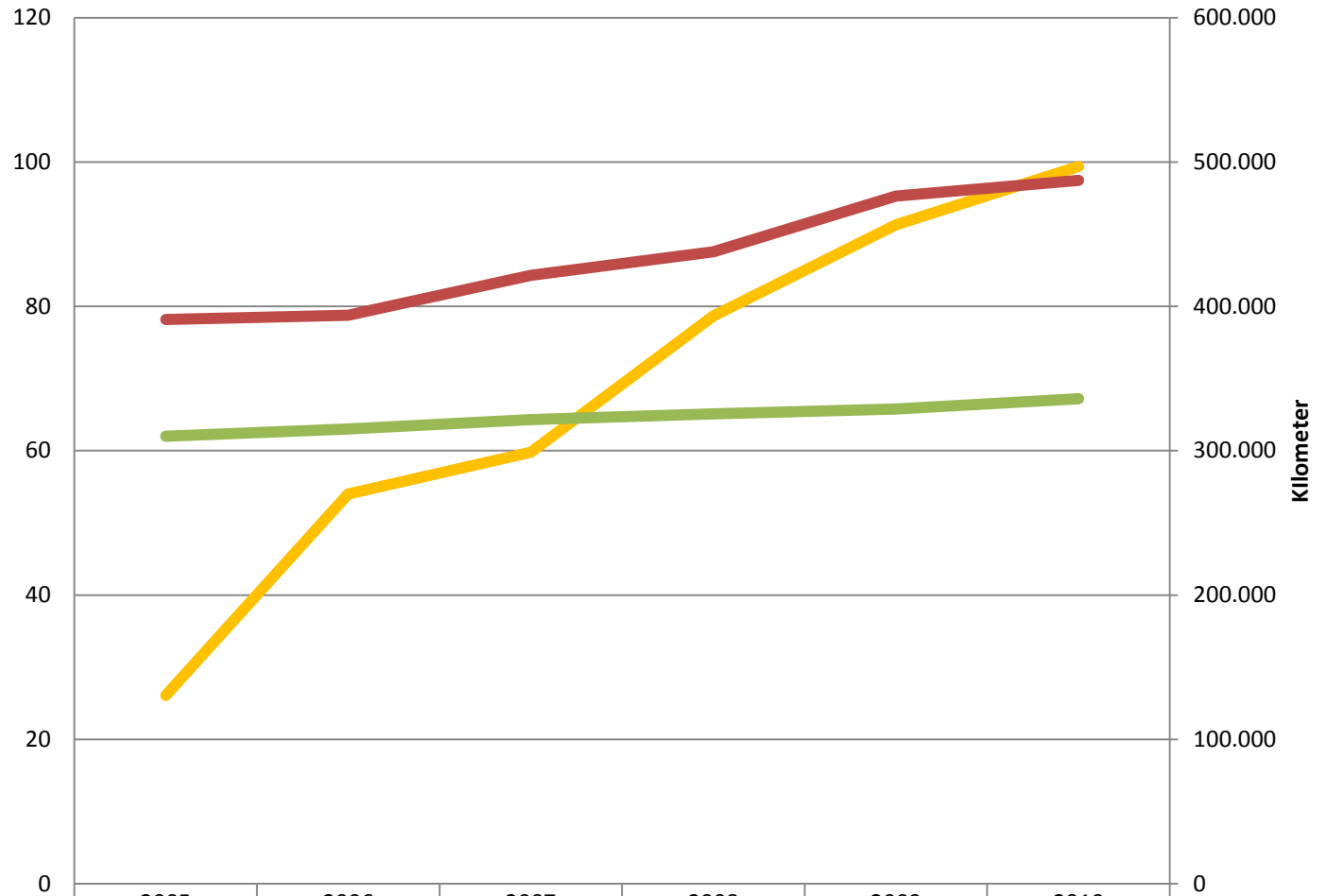
Pendidikan



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
APM SD/MI (Tahun)	94,3	94,48	94,9	95,14	95,23	95,41	95,55	
APM SMP/MTs (Tahun)	64,6	68,08	71,6	72,28	74,52	75,64	77,71	
APK SMA/MA (Tahun)	52,2	56,22	60,51	64,28	69,6	70,53	76,5	
APK PT (Tahun)	17,94	19,98	20,65	21,26	21,57	26,34	27,09	
Anggaran pendidikan (Trilyun)	78,5	122,9	142,2	154,1	208,2	225,2	266,9	289,9

Infrastruktur

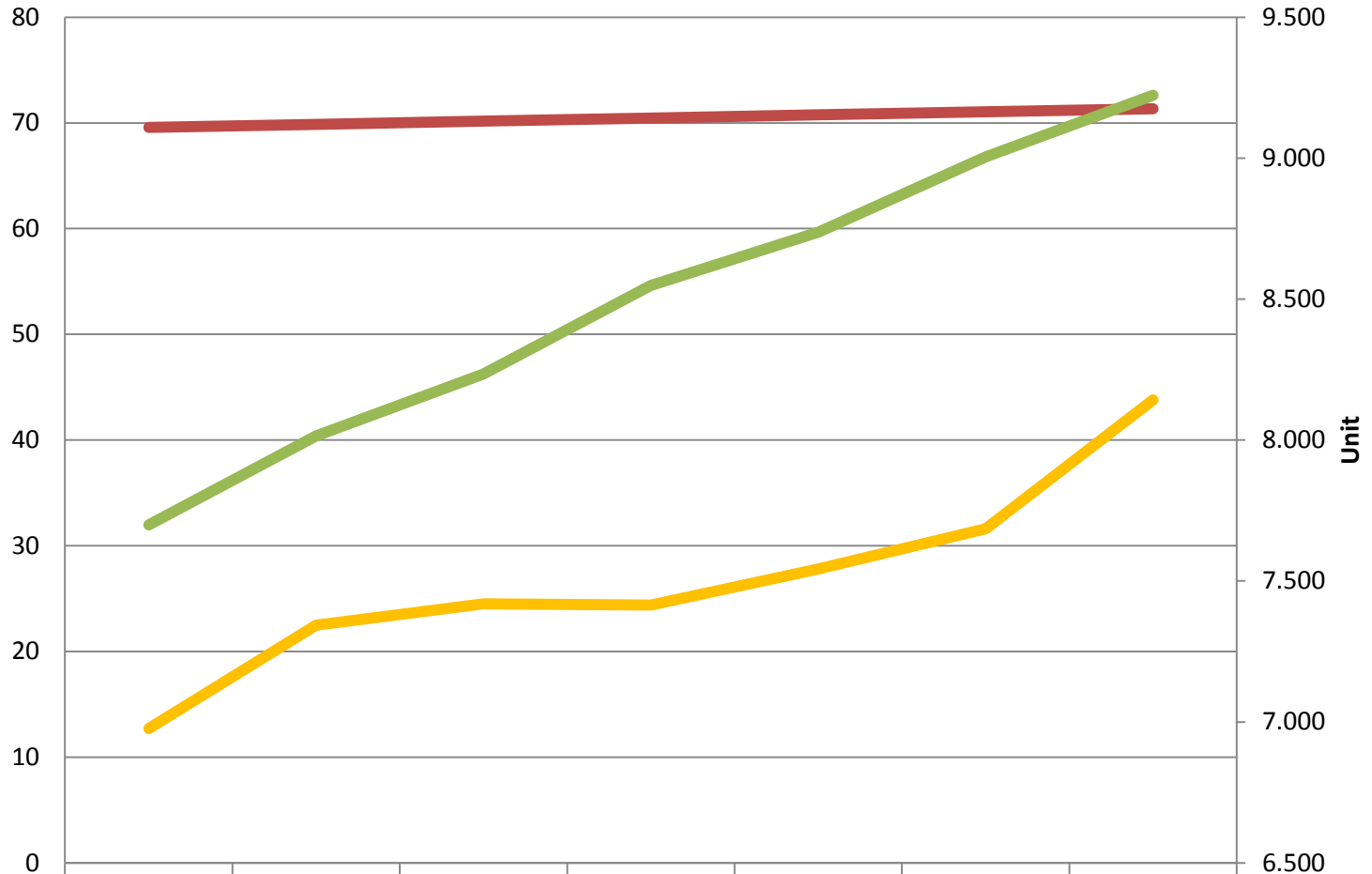
Prosentase/Triliun Rupiah



	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Anggaran Infrastruktur (Triliun)	26,1	54	59,8	78,7	91,3	99,4
Rasio Elektrifikasi (%)	62,0	63,0	64,3	65,1	65,8	67,2
Rasio Panjang Jalan Nasional (Km)	391.009	393.794	421.535	437.759	476.337	487.314

Kesehatan

Tahun/Trilyun Rupiah



Anggaran Kesehatan (Trilyun)

Umur Harapan Hidup (Tahun)

Jumlah Puskesmas (Unit)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

12,7

22,5

24,5

24,4

27,8

31,6

43,8

69,57

69,87

70,16

70,46

70,76

71,05

71,33

7.699

8.015

8.234

8.548

8.737

9.005

9.223

INSTRUMEN ANGGARAN

Kementerian PPN/
Bappenas

INSTRUMEN	PERENCANAAN DAN ALOKASI	PELAKU UTAMA
R A P B N		
1. Dana Dekonsentrasi/TP	Negosiasi	Kemenkeu, K/L, DPR
2. Utang Luar Negeri	Negosiasi	Kemenkeu, K/L, Bappenas, DPR
3. Grant/Hibah	Negosiasi	Kemenkeu, K/L, Bappenas, DPR
4. B U M N	Negosiasi	Kemenkeu, K/L, DPR
R A P B D		
1. Dana Alokasi Umum	Formula	Kemenkeu, DPR, Pemda, Kemendagri
2. Dana Alokasi Khusus	Formula dan “Negosiasi”	Kemenkeu, DPR, Pemda, K/L, Kemendagri
3. Dana Bagi Hasil	Formula dan Negosiasi	Kemenkeu, DPR, K/L, Pemda
4. Utang/Hibah	Negosiasi	Kemenkeu, K/L, Bappenas, DPR
5. B U M D	Negosiasi	Sekda, SKPD, DPRD

INSTRUMEN ANGGARAN

Kementerian PPN/

INSTRUMEN ANGGARAN	PERENCANAAN DAN ALOKASI	PELAKU UTAMA
A. INVESTASI PEMERINTAH		
1. Dana Dekon dan TP	Negosiasi	Kemenkeu, K/L, DPR
2. Utang Luar Negeri	Negosiasi	Kemenkeu, K/L, Bappenas, DPR
3. Grant/Hibah Luar Negeri	Negosiasi	Kemenkeu, K/L, Bappenas, DPR
4. B U M N	Negosiasi	Kemenkeu, K/L, DPR
B. INVESTASI PEMDA		
1. Dana Alokasi Umum	Formula	Kemenkeu, DPR, Pemda, Kemendagri
2. Dana Alokasi Khusus	Formula dan "Negosiasi"	Kemenkeu, DPR, Pemda, K/L, Kemendagri
3. Dana Bagi Hasil	Formula dan "Negosiasi"	Kemenkeu, DPR, K/L, Pemda
4. Dana Otsus	Negosiasi	Kemenkeu, DPR, Pemda
5. B U M D	Negosiasi	Sekda, SKPD, DPRD
C. INVESTASI SWASTA		
1. Investasi PMDN	Bisnis Plan dan "Insentif"	
2. Investasi PMA	Bisnis Plan dan "Insentif"	

ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH

WILAYAH	DANA DEKON + TP		DANA PERIMBANGAN		INVESTASI PMA	
	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2008 (US \$ Juta)	SHARE (%)
SUMATERA	37.213	15,65	62.138	27,65	1.133	11,29
JAWA-BALI	157.630	66,31	78.519	34,94	8.516	84,91
KALIMANTAN	11.721	4,93	30.487	13,57	283	2,82
SULAWESI	15.950	6,71	23.811	10,60	76	0,76
NUSA TENGGARA	5.995	2,52	9.965	4,43	8	0,08
MALUKU	4.278	1,80	5.889	2,62	7	0,07
PAPUA	4.942	2,08	13.890	6,18	5	0,05
TOTAL	237.729	100,00	224.698	100,00	10.030	100,00

Distriusi Dana Dekon+TP (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 81,69
2. Kalimantan: 4,93
3. Sulawesi: 6,71
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 4,08
5. Papua: 2,08

Distriusi Dana Perimbangan (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 62,59
2. Kalimantan: 13,57
3. Sulawesi: 10,60
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 9,92
5. Papua: 6,18

Sumber: Diolah dari Kerangka Acuan, Baku, 2009, Badan Koordinasi
Indonesia dan BKPM

Distriusi Investasi PMDN (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 86,78
2. Kalimantan: 7,19
3. Sulawesi: 5,26
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 0,08
5. Papua: 0,70

Distribusi Kredit Perbankan (%):

1. Jawa-Bali dan Sumatera: 88,22
2. Kalimantan: 5,18
3. Sulawesi: 4,50
4. Maluku dan Nusa Tenggara: 1,21
5. Papua: 0,59

WILAYAH	INVESTASI PMDN		KREDIT PERBANKAN		KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH	
	RATA-RATA 2005-2008 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)
SUMATERA	8.400	31,52	193.749	15,44	117.393	18,79
JAWA-BALI	14.729	55,26	913.352	72,78	408.768	65,43
KALIMANTAN	1.916	7,19	67.483	5,38	33.704	5,40
SULAWESI	1.402	5,26	56.483	4,50	43.281	6,93
NUSA TENGGARA	21	0,08	12.436	0,99	11.971	1,92
MALUKU	0,3	0,00	4.006	0,32	3.523	0,56
PAPUA	185	0,70	7.442	0,59	6.068	0,97
TOTAL	26.654	100	1.254.951	100	624.708	100,00

ALOKASI SUMBERDAYA ANTARWILAYAH

WILAYAH	DANA DEKON + TP		DANA PERIMBANGAN		INVESTASI PMA		INVESTASI PMDN		KREDIT PERBANKAN		KKREDIT MIKRO KECIL MENENGAH	
	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2009 (Rp. Juta)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2008 (US \$ JUTA)	SHARE (%)	RATA-RATA 2005-2008 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)	RATA-RATA 2007-2009 (Rp. Miliar)	SHARE (%)
SUMATERA	37.213	15,65	62.138	27,65	1.133	11,29	8.400	31,52	193.749	15,44	117.393	18,79
JAWA-BALI	157.630	66,31	78.519	34,94	8.516	84,91	14.729	55,26	913.352	72,78	408.768	65,43
KALIMANTAN	11.721	4,93	30.487	13,57	283	2,82	1.916	7,19	67.483	5,38	33.704	5,40
SULAWESI	15.950	6,71	23.811	10,60	76	0,76	1.402	5,26	56.483	4,50	43.281	6,93
NUSA TENGGARA	5.995	2,52	9.965	4,43	8	0,08	21	0,08	12.436	0,99	11.971	1,92
MALUKU	4.278	1,80	5.889	2,62	7	0,07	0,3	0,00	4.006	0,32	3.523	0,56
PAPUA	4.942	2,08	13.890	6,18	5	0,05	185	0,70	7.442	0,59	6.068	0,97
TOTAL	237.729	100,00	224.698	100,00	10.030	100,00	26.654	100	1.254.951	100	624.708	100,00

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan BKPM

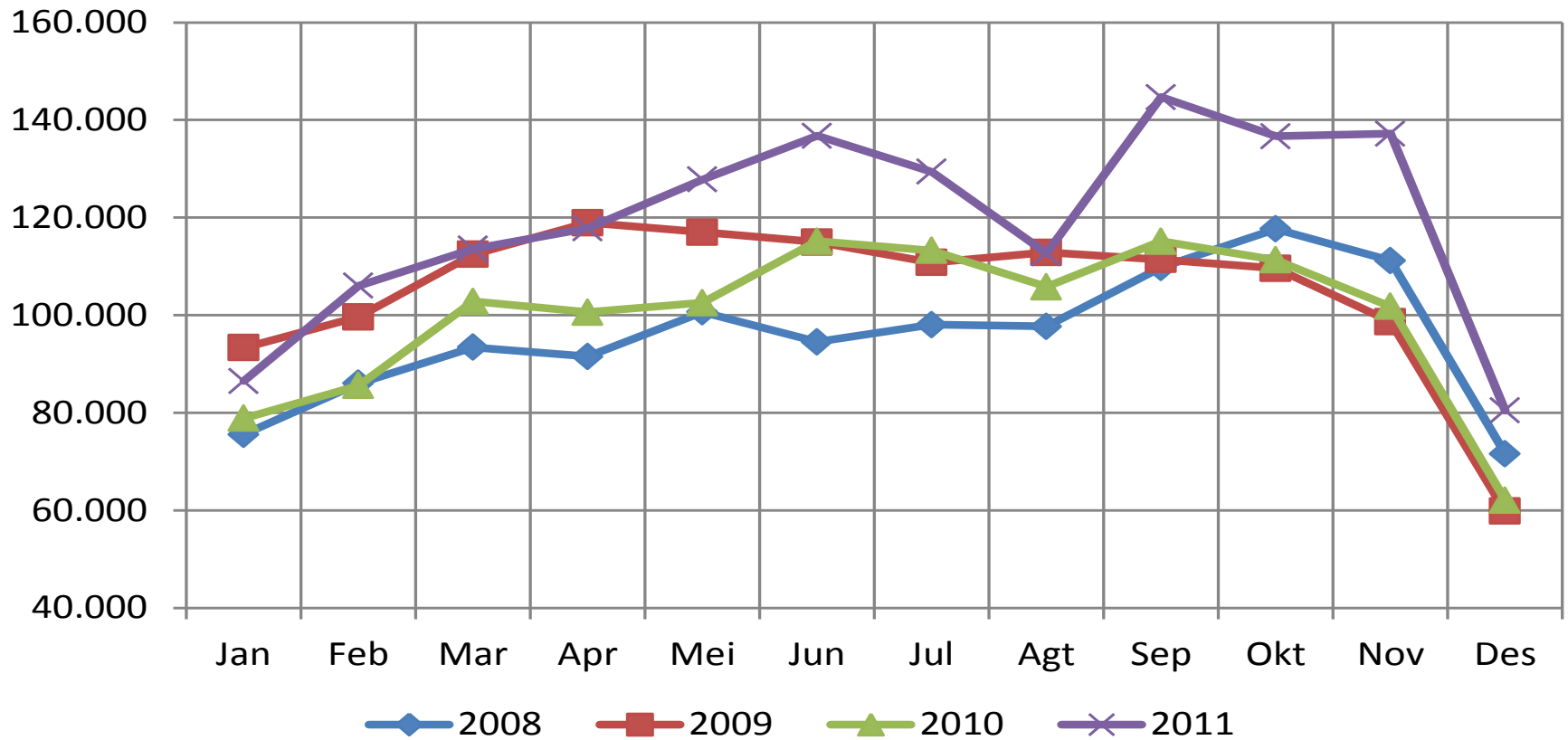
1. Distribusi sumber daya selama kurun waktu 2005-2009 menunjukkan sebagian besar terpusat di Jawa-Bali.
2. Perlu langkah terobosan optimalisasi alokasi sumber daya untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, dan Sumatera antara lain:
 - (1) *“Location switching”* investasi pemerintah dari Wilayah Jawa-Bali ke Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, dan Sumatera.
 - (2) *“Strengthening Public-Private Partnership”* untuk Wilayah Jawa-Bali.
 - (3) *“Promoting Regional Banking”* untuk Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi, dan Sumatera.

POSISI PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN BEBERAPA NEGARA ASIA

Negara	2007-2008		2008-2009		2009-2010		2010-2011		2011-2012	
	ranking	skor	ranking	skor	ranking	skor	ranking	skor	ranking	skor
Singapura	7	5.45	5	5.53	3	5.55	3	5.48	2	5.63
Malaysia	21	5.1	21	5.04	24	4.87	26	4.88	21	5.08
China	34	4.57	34	4.70	29	4.74	27	4.84	26	4.9
Thailand	28	4.7	28	4.60	36	4.56	38	4.51	39	4.52
Indonesia	54	4.24	55	4.25	54	4.26	44	4.43	46	4.38
Vietnam	64	4.04	64	4.10	75	4.03	59	4.27	65	4.24
Filipina	71	3.99	71	4.09	87	3.9	85	3.46	75	4.08

Sumber : *Global Competitiveness Report*, berbagai tahun

Dana Idle PEMDA di Perbankan (dalam Miliar Rupiah)



Pejabat Daerah Dan PNS Tersangkut Masalah Hukum

Kemendagri (s/d Januari 2011)

138 Bupati

17 Gubernur

KPK (s/d Maret 2011)

158 Bupati/Walikota

17 Gubernur

ICW (Selama 2011)

436 Kasus

1053 PNS



3

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Kesimpulan dan Tindak Lanjut

- UU 25/2004 Telah sesuai dengan landasan akademis namun belum dilaksanakan sepenuhnya karena terbentur peraturan lainnya, terutama menyangkut Keuangan dan Otonomi Daerah
- Penerapan UU 25/2004 perlu dilaksanakan dengan konsistensi yang lebih kuat oleh Bappenas
- Perlu dilakukan sinkronisasi antar-peraturan baik antar UU maupun antar UU dan PP atau antar PP yang bersifat lintas UU dengan substansi yang sama



TERIMA KASIH